

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN KINERJA EKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

WIRA HENDRI
FKIP Universitas Gunung Rinjani
Email; wirahendri@gmail.com

ABSTRACT

Prospirety of society was the form big problem and finished yet and we know that of prospirety prom the Human Development Index is conducted in different blooming between regency and provincy especially in NTB the West of Nusa Tenggara and differences arrising is caused there were differenced in organizer from each of teritory the potential of financial through fiscal desentralization and organizer of financial was an effective instrument to pushed prospirety of society life to goverment wanted but as we know that is till now ocured pro and contra betweet some expert about the importance of function local financial performance and organizer of finncial to developed prospirety of society is still unconsistant or diffrent opinion from experts till now about the relation between variable to show signify the final relation that and it needed comprehensive model to determine of indication variable. So it coud solved the prospirety problem between regancy and prosvincy in the west of Nusa (NTB).

The purposed of this research is analysed the effect of local financial performance in regency toward the performance of the area economy and prospirety of society especially in regency area and provincy of Nusa (NTB) and the researched variable is used in this analysis were: the local financial performance, the performance of the area economy and prospirety of society. The data in this research is used the panel data. And the composite from ten Regency and provincy withtiting distace 2008 – 2017. And this data i got from Department of financial, and statistic center in west of Nusa (NTB) whereas tecnique of data is used by the PLS model.

The conclusion from the product analysed were: (1) local financial performance was positif and significant influential toward the performance of the area economy; (2) local financial performance was positif and significant influential toward prospirety of society, (3) the performance of the area economy able with full mediation from local financial performance to prospirety of society.

Key Words: Local financial performance, the performance of the area economy, prospirety of society

ABSTRAK

Prospir masyarakat adalah bentuk masalah besar dan belum selesai dan kita tahu bahwa dari prospirety Indeks Pembangunan Manusia dilakukan dalam mekar yang berbeda antara kabupaten dan provinsi terutama di NTB Barat Nusa Tenggara dan perbedaan timbul karena ada perbedaan dalam penyelenggaraan dari masing-masing wilayah potensi keuangan melalui desentralisasi fiskal dan penyelenggara keuangan adalah instrumen yang efektif untuk mendorong kemakmuran kehidupan masyarakat ke pemerintah yang diinginkan tetapi seperti yang kita tahu bahwa sampai sekarang terjadi pro dan kontra betweet beberapa ahli tentang pentingnya fungsi kinerja keuangan daerah dan penyelenggara keuangan nasional untuk mengembangkan kemakmuran masyarakat masih tidak konsisten atau berbeda pendapat dari para ahli sampai sekarang tentang hubungan antara variabel untuk menunjukkan menandakan hubungan akhir itu dan diperlukan model komprehensif untuk menentukan variabel indikasi. Jadi, itu bisa memecahkan masalah prospirety antara regancy dan prosincincy di barat Nusa (NTB).

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah di kabupaten terhadap kinerja perekonomian daerah dan prospek masyarakat khususnya di daerah kabupaten dan provinsi Nusa (NTB) dan variabel yang diteliti yang digunakan dalam analisis ini adalah: lokal kinerja keuangan, kinerja ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat. Data dalam penelitian ini menggunakan data panel. Dan gabungan dari sepuluh Kabupaten dan provinsi dengan gangguan waktu 2008 - 2017. Dan data ini saya dapatkan dari Departemen Keuangan, dan pusat statistik di sebelah barat Nusa (NTB) sedangkan teknik data digunakan oleh model PLS.

Kesimpulan dari produk yang dianalisis adalah: (1) kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah; (2) kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemakmuran masyarakat, (3) kinerja ekonomi daerah mampu dengan mediasi penuh dari kinerja keuangan daerah hingga kemakmuran masyarakat.

Kata Kunci: Kinerja keuangan lokal, kinerja ekonomi daerah, kemakmuran masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan kinerja ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Kinerja ekonomi yang tinggi akan membawa pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat (Raswita & Made, 2013). Perwujudan kesejahteraan tersebut utamanya dilakukan melalui program pembangunan yang terencana, terpadu dan memiliki perspektif jangka panjang. Program pembangunan kemudian direfleksikan dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan tingkat kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan dan pembangunan yang berkualitas. Dengan kata lain, mewujudkan kesejahteraan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat pada setiap lapisan yang ada.

Berbagai masalah timbul dalam kaitan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah. Dimana Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah pada periode tertentu adalah tingkat pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) riil. Akan tetapi banyak permasalahan timbul dari pertumbuhan ekonomi ini, salah satunya adalah berbagai fenomena tentang kesenjangan yang terjadi dalam suatu wilayah.

Selain itu, kualitas pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan

kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja. Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang agar penduduk dapat hidup layak. Tujuan tersebut akan dapat tercapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan dan berketrampilan serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menurunnya pengangguran dan kemiskinan juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat (1), keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Provinsi merupakan daerah otonom dan sekaligus wilayah administrasi sebagai pelaksana kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur.

Salah satu provinsi di Indonesia yang menerima otonomi penuh semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 2001 adalah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah akan semakin dekat dengan masyarakatnya sehingga akan lebih

mensejahterakan masyarakatnya. Dengan demikian, daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat. Paradigma pembangunan menempatkan manusia (penduduk) sebagai

fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembnagunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan pendidikan. Selama tahun 2012 - 2017 perkembangan IPM di Kabupaten/Kota di provinsi NTB terus mengalami peningkatan seperti yang disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 - 2017 (Persen)

No	Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Lombok Barat	62,24	62,91	63,52	64,62	65,55	66,37	64,20
2	Lombok Tengah	60,57	61,25	61,88	62,74	63,22	64,36	62,34
3	Lombok Timur	60,73	61,43	62,07	62,83	63,70	64,37	62,52
4	Sumbawa	61,96	62,44	62,88	63,91	64,89	65,84	63,65
5	Dompu	62,60	63,16	63,53	64,56	65,48	66,33	64,28
6	Bima	61,05	62,08	62,61	63,48	64,15	65,01	63,06
7	Sumbawa Barat	66,45	66,86	67,19	68,38	69,26	70,08	68,04
8	Lombok Utara	58,19	59,20	60,17	61,15	62,24	63,04	60,67
9	Kota Mataram	74,22	75,22	75,93	76,37	77,20	77,84	76,13
10	Kota Bima	71,21	71,72	72,23	72,99	73,67	74,36	72,70
	NTB	62,98	63,76	64,31	65,19	65,81	66,58	64,77
	Indonesia	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	69,24

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Tahun 2018 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa secara rata-rata IPM di provinsi NTB berada di bawah rata-rata IPM secara nasional. Hal ini terjadi karna masih belum efektif dan meratanya alokasi pembangunan pada setiap daerah. meskipun berada di bawah rata-rata nasional, IPM di provinsi NTB mengalami trend peningkatan dari 62,98 persen pada tahun 2012 menjadi 64,77 persen pada tahun 2017. Daerah yang memiliki IPM paling tinggi adalah Kota Mataram dengan indeks rata-rata 76,13 persen, sementara yang terendah adalah Kabupaten Lombok Utara dengan indeks sebesar 60,67 persen. Dari Tabel 1.1 dapat dilihat pula bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan IPM di wilayah Kabupaten/Kota agak timpang. Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan kesejahteraan masyarakat diberbagai daerah yang dicerminkan oleh perbedaan IPM adalah perbedaan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Kalau dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada potensi keuangan atau

desentralisasi fiskal dan pengelolaan atau kinerja keuangannya. Artinya, desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan yang bagus akan berdampak terhadap kualitas kinerja ekonomi daerah. Kinerja keuangan daerah menurut Halim (2001) dapat dilihat dari: efektivitas, efisiensi, kemandirian keuangan, keserasiannya dan upaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di lain pihak, kinerja ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Dengan adanya kinerja ekonomi yang baik menyebabkan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Adanya hubungan tersebut mendorong para ahli melakukan penelitian antara lain Oates (1993); Bird (1993); Bird, Ebel, dan Wallich (1995); Martinez dan McNab (2003); World Bank (1997); Bahl dan Linh (1992) dan Gramlich (1993) mengatakan bahwa dengan diserahkannya beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga dipertegas oleh penelitian oleh

Prud'homme (1995), Peterson (1996), Zang dan Zao (1998) mengatakan terdapat pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam perkembangannya, Pelaksanaan desentralisasi fiskal provinsi Nusa Tenggara Barat belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat di ketahui dari realisasi pencapaian desentralisasi fiskal yang diukur dari kemampuan PAD yang selalu berada bawah

target/penganggaran PAD yang telah direncanakan. Meskipun perkembangan PAD memiliki trend yang meningkat selama lima tahun tetapi realisasinya selalu di bawah target yang direncanakan (Tabel 1.2). situasi ini mengakibatkan rencana program pemerintah untuk percepatan pembangunan daerah menjadi terhambat dan bergantung pada bantuan pemerintah pusat sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
 Perkembangan PAD dan Dana Perimbangan Provinsi NTB Tahun 2013-2017
 (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	PAD	Target PAD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana Perimbangan
2013	847.866	904.540	270.816	859.353	57.407	1.187.576
2014	1.194.261	1.374.112	191.154	980.390	54.663	1.226.208
2015	1.372.661	1.442.602	186.910	1.063.714	54.663	1.305.287
2016	1 450 044	1.621.041	192.824	1.117.691	255.454	1.565.970
2017	1.501.611	1.821.341	353.125	1.496.972	1.372.422	3.222.521

Sumber: Depkeu RI, 2018

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang di terima oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama lima tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2013 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,847 triliun kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 1,5 triliun. Dana perimbangan dari 1,187 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp 3,222 triliun pada tahun 2017. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan kecendrungan yang semakin membaik dimana pada tahun 2017 Dana Bagi Hasil (DBH) 353.125 milyar lebih tinggi dari

tahun sebelumnya sebesar 192.824 milyar. Begitu juga jika dilihat pada transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Selanjutnya, dengan peningkatan penerimaan daerah pemerintah mengalokasikan belanja daerah pada program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya sebagian besar dana daerah di gunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Hal ini dilihat dari realisasi belanja daerah pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) ditunjukkan oleh Tabel 1.3.

Tabel 1.3
 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2013 – 2017
 (Dalam Milyar Rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Tidak Langsung	1.482.116	1.699.164	1.660.756	1.946.919	2.921.302
- Belanja Pegawai	472.162	546.752	567.926	648.449	1.383.300
- Belanja Bunga	-	-	-	-	-
- Belanja Subsidi	198	250	-	-	-
- Belanja Hibah	669.155	562.619	549.328	749.481	980.897
- Belanja Bantuan sosial	55.887	57.732	36.550	33.648	17.455
- Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	215.436	457.678	475.496	477.787	531.938

- Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	67.067	65.134	21.530	26.621	3.711
- Belanja tidak terduga	2.212	9.000	9.926	10.930	4.000
Belanja Langsung	892.788	1.135.040	1.332.882	1.628.576	2.087.694
- Belanja Pegawai	76.961	95.633	102.806	131.099	164.750
- Belanja Barang dan jasa	365.548	540.867	619.695	809.514	932.207
- Belanja Modal	450.279	498.540	610.381	687.962	990.736

Sumber: Departemen Keuangan RI

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas Selama lima tahun terakhir, realisasi belanja tidak langsung cenderung meningkat secara konsisten setiap tahun. Realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2017 meningkat sebesar 2,9 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,9 triliun. Demikian pula untuk belanja langsung selama tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,6 triliun. Berdasarkan kontribusinya, porsi terbesar belanja daerah selama tahun 2017 berasal dari komponen belanja tidak langsung mencapai 60,39 persen, sisanya merupakan belanja langsung sebesar 39,61 persen. Pada komponen belanja tidak langsung, didominasi oleh belanja hibah mencapai 53,23 persen, diikuti oleh belanja pegawai dan belanja bagi hasil masing – masing sebesar 21,48 persen dan 20,34 persen. Sementara komponen belanja untuk bantuan sosial dan bantuan keuangan masih relatif kecil yakni masing – masing 4,19 persen dan 0,58 persen.

Pada komponen belanja langsung, porsi belanja pegawai cukup rendah yakni 6,46 persen. Cukup tingginya porsi belanja barang dan jasa sebesar 46,46 persen dan belanja modal sebesar 46,72 persen, diharapkan sebagai daya ungkit dalam rangka optimalisasi capaian kinerja pembangunan selama tahun anggaran dan periode berikutnya. Alokasi belanja modal selama tahun 2017 mencapai 990.736 miliar rupiah, diikuti belanja barang dan jasa senilai

932.207 miliar rupiah dan belanja pegawai senilai 164.750 miliar rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2016, belanja tidak langsung selama tahun 2017 meningkat dari 1,6 triliun rupiah menjadi 2 triliun rupiah. Dilihat dari kontribusinya terhadap keseluruhan nilai belanja daerah, peranan belanja tidak langsung meningkat dari 51,45 persen di tahun 2015 menjadi 60,39 persen di tahun 2016.

Kenaikan belanja daerah yang terjadi pada tiap tahun ternyata belum mampu membiayai kebutuhan pembangunan daerah di wilayah NTB. Hal ini dapat di ketahui dari indikator rasio kemandirian keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintah masih tergolong rendah. Rasio kemandirian keuangan daerah di tahun 2012 - 2016 termasuk dalam kriteria rendah sekali karena nilai kemandirian keuangan daerahnya kurang dari 25 persen kecuali Kota Mataram dengan kriteria rendah (Tabel 1.4). Kriteria rendah sekali ini menunjukkan sebagian besar pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerahnya sehingga akan sangat tergantung dari transfer dan bantuan dari pemerintah pusat, terutama DAU. Akibatnya kesejahteraan masyarakat sangat bergantung dari bantuan pemerintah pusat.

Tabel 1.4
 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
 di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2012 s/d 2016

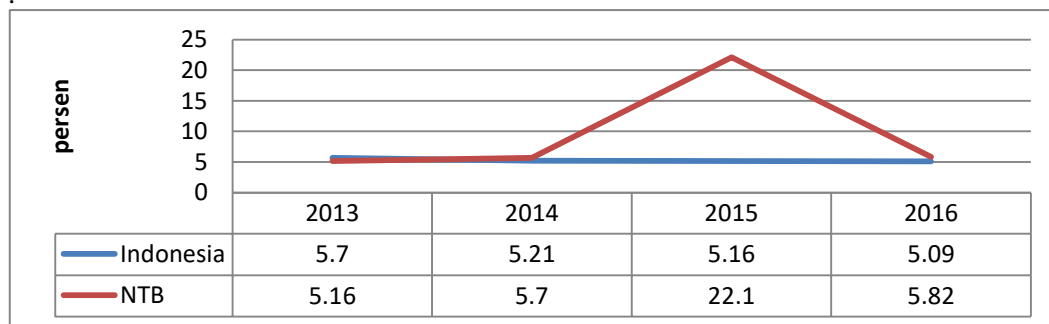
Kabupaten/Kota	Rata-rata Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kriteria
Bima	10,75	Rendah sekali
Dompu	10,57	Rendah sekali
Lombok Barat	22,57	Rendah sekali
Lombok Tengah	14,73	Rendah sekali
Lombok Timur	15,25	Rendah sekali
Sumbawa	14,45	Rendah sekali

Kota Mataram	32,3	Rendah
Kota Bima	5,5	Rendah sekali
Lombok Barat	10,07	Rendah sekali
Lombok Utara	18,75	Rendah sekali

Sumber: Depkeu, 2017 (Diolah)

Rendahnya kemandirian pengelolaan keuangan daerah tentu membawa dampak negatif terhadap perkembangan variabel makro ekonomi di wilayah NTB. Terdapat beberapa indikator yang dijadikan ukuran untuk melihat variabel makro suatu daerah. Pertama, Di lihat dari hasil *output* pembangunan daerah yang tercermin pertumbuhan ekonomi. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB selama empat tahun terakhir menunjukkan kecenderungan selalu meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 - 2016 mengalami pertumbuhan positif meskipun

sempat mengalami penurunan pada tahun 2016. Meskipun pertumbuhan ekonomi NTB lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional tetapi belum mampu memecahkan permasalahan dasar yang dihadapi masing-masing daerah, yaitu besarnya angka pengangguran dan kemiskinan. Hampir di semua daerah di NTB perekonomian cenderung meningkat, tetapi pertumbuhan tersebut belum mampu menyerap jumlah pengangguran yang cukup besar di wilayah ini, sehingga diperlukan laju pertumbuhan yang lebih besar lagi untuk mendorong kinerja ekonomi makro daerah



Gambar 1.1
 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi NTB 2013 - 2016

Sumber: BPS, 2017

Kedua, di lihat dari indikator sosial (tenaga kerja) di NTB Pada tahun 2015 jumlah pengangguran terbuka di Provinsi NTB adalah sebanyak 10.741 orang, mengalami peningkatan sebanyak 11.324 orang tahun 2016 (BPS, 2016). Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal, sehingga angka pengangguran masih terbilang tinggi.

KAJIAN TEORITIS

Kesejahteraan Masyarakat

teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contractarian approach*. *Classical utilitarian* menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kepuasan setiap individu dapat dibandingkan secara kuantitatif. *Neoclassical welfare* menekankan pada prinsip *pareto optimality*. *Pareto optimum* didefinisikan sebagai sebuah posisi di mana tidak memungkinkan suatu

relokasi input atau output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang lebih buruk. *New contractarian approach* menekankan pada konsep dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya. Ketiga pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan dan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya.

United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan formula Human Development Index (HDI) atau disebut pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara/daerah merupakan negara/daerah maju, berkembang, atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986).

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007).

Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain: Rasio Drajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Dearah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Upaya Fiskal dan Rasio Pertumbuhan.

Penelitian Halim dan Jamal (2006) dikota Malang dalam rangka otonomi daerah ditinjau dari aspek kemampuan keuangan daerah adalah belum optimal dikarenakan kontribusi PAD terhadap APBD kota Malang rata-rata sebesar 13,23 persen selama tahun 2000 – 2004. Sedangkan kemampuan PAD untuk menopang pengeluaran daerah relatif masih rendah dengan kontribusi rata-rata sebesar 15,51 persen untuk periode yang sama, sehingga ketergantungan pemerintah kota malang terhadap sumber keuangan lain masih relatif tinggi. Sementara untuk realisasi PAD selama tahun 2000 – 2004 melebihi dari yang ditargetkan yaitu rata-rata sebesar 103,97 persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 29,73 persen pertahun.

Kinerja Ekonomi Daerah

Kinerja Ekonomi diartikan sebagai gambaran bagus tidaknya perekonomian suatu daerah. Variabel - variabel yang dapat

memperlihatkannya adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, pengangguran, tenaga kerja dan kependudukan, (Kuncoro, 2003). Menurut McEachern (2000) untuk mengukur kinerja ekonomi pada suatu wilayah dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan melihat jumlah pekerja, rata-rata penghasilan, jumlah produksi, jumlah dan ukuran perusahaan. Disamping itu, ukuran kinerja perekonomian yang sering diperhatikan untuk mengetahui kemajuan ekonomi suatu wilayah atau negara adalah pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja, produktivitas, standar hidup, pengangguran, inflasi, tabungan dan formulasi modal, serta variabel lainnya.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian (research design) Kajian Desentralisasi Fiskal dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk memecahkan pokok masalah, tujuan dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan tingkat eksplanasi asosiatif dengan pengukuran statistik yang didukung data skunder dengan dimensi waktu menggunakan data panel (Pooled data) yaitu kombinasi dari pengamatan cross section sebanyak 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan time series selama 10 tahun periode 2008 – 2017. Pendekatan tingkat Eksplanasi asosiatif mencoba mencari kejelasan tentang fenomena atau hubungan antar satu variabel dengan variabel lain dengan menggunakan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi melalui studi pustaka, wawancara mendalam baik secara langsung maupun tidak langsung dan dokumentasi.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi dari ke 33 provinsi di Indonesia seperti peta yang ditunjukkan pada gambar 4.1. secara administrasi provinsi Nusa Tenggara Barat mencakup 10 Kabupaten/Kota yang terdiri dari: 1) Kabupaten Lombok Timur; 2) Kabupaten Lombok Tengah; 3) Kabupaten Lombok Barat; 4) Kabupaten Lombok Utara; 5) Kabupaten Sumbawa; 6) Kabupaten Sumbawa Barat; 7) Kabupaten Bima; 8) Kota Bima; 9) Kota Mataram; 10) Kabupaten Dompu.

Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi penelitian di landasi

beberapa pertimbangan. Pertama, pasca reformasi perkembangan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai saat pengamatan ini telah terbentuk menjadi 10 Kabupaten/Kota secara definitif. Namun masih tercatat memiliki persentase angka kemiskinan relatif tinggi (BPS 2016); kedua, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, namun yang baru di kelola secara menonjol pada sektor pertanian, pertambangan dan pariwisata yang berkontribusi relatif besar dalam struktur ekonomi daerah; ketiga, pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang tidak merata akibat terkonsentrasinya pembangunan pada bagian Kabupaten/Kota yang berada di wilayah pusat kota; kelima, adanya sebaran penduduk tidak merata antar Kabupaten/Kota dimana Kabupaten/Kota yang berada di pulau Lombok lebih besar jumlah penduduknya dibandingkan Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Sumbawa; keenam, penelitian ilmiah seperti ini sangat sedikit dilakukan di provinsi Nusa Tenggara Barat oleh peneliti sebelumnya.

b. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan model SEM yang berbasis komponen atau varian. Adapun langkah-langkah permodelan persamaan struktural berbasis PLS dengan *software* Smart-PLS, yaitu: (1) merancang model struktural; (2) merancang model pengukuran (*outer model*); (3) menkonstruksi diagram jalur; (4) konversi diagram jalur ke dalam sistem persamaan untuk *outer model*; (5) estimasi; (6) pengujian *Goodness of Fit Model*; dan (7) pengujian hipotesis.

HASIL PENELITIAN

Model Persamaan Struktural

Uji Outer Model

Untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan untuk membentuk konstruk atau variabel latent dalam penelitian adalah valid, maka dilakukan analisis sebagai berikut.

1) *Convergent Validity*

Hampir semua indikator yang membentuk konstruk eksogen (reflektif), yaitu: Desentralisasi fiskal, Kinerja Keuangan, Kinerja Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan memiliki nilai *outer loading* diatas 0,50 dan secara statistik adalah signifikan dengan nilai *t*-hitung lebih besar dari 1,96. Hal ini berarti terpenuhi syarat *convergent validity*, kecuali

untuk indikator KE3 (Penyerapan Tenaga Kerja) terhadap konstruk Kinerja Ekonomi.

Indikator tersebut memiliki nilai *outer loading* lebih kecil dari 0,50 dan nilai *t*-hitung lebih kecil dari 1,96, sebagai tindak lanjut hal tersebut maka KE3 harus di drop.

2) *Discriminant Validity*

Untuk mengetahui validitas suatu konstruk juga dapat dilihat dari *discriminant validity*. *Discriminant validity* pada indikator reflektif adalah dengan melihat *cross loading* indikator terhadap konstruk atau latennya. Hasil analisis data menunjukkan bahwa *discriminant validity* sudah terpenuhi dengan melihat *cross loading* yang sudah terpenuhi dengan baik, karena indikatornya memiliki *cross loading* pada konstruknya lebih tinggi dibandingkan terhadap konstruk lainnya.

Kelayakan konstruk yang dibuat juga dapat dilihat dari *discriminant validity* melalui *Average Variance Extracted* (AVE), diketahui bahwa konstruk desentralisasi fiskal, kinerja keuangan, kinerja ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat memiliki nilai AVE diatas 0,50 sehingga dikatakan baik.

1. Uji Inner Model

Uji inner model merupakan pengujian antar variabel dengan melihat nilai *R-Square* dan Q^2 atau *Stone Geiser Q Square test*. Konstruk dengan melihat pengaruh signifikan antar konstruk yang diuji.

Model struktural dalam PLS perlu dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk variabel dependen dan nilai signifikansinya berdasarkan nilai *t-values* pada setiap *path*. Tabel 1. menunjukkan nilai *R-square* untuk setiap variabel endogen.

Tabel 1. Nilai *R Square* untuk Variabel Konstruk Endogen

Variabel	R-square	Keterangan
Kinerja Keuangan (X_2)	0,114	Lemah
Kinerja Ekonomi (Y_1)	0,320	Lemah
Kesejahteraan Masyarakat (Y_3)	0,820	Kuat

Berdasarkan R^2 pada Tabel 2. diperoleh nilai Q^2 sebesar 0,930, dapat diartikan bahwa 93 persen variasi dari variasi dalam kesejahteraan masyarakat di jelaskan oleh variabel kinerja keuangan dan kinerja ekonomi.

a. Pengaruh Langsung

Untuk mengetahui pengaruh langsung antarvariabel konstruk dapat dilihat dari hasil analisis nilai *path coefficients* yang ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. *Path Coefisient* Desentralisasi Fiskal (X1), Kinerja Keuangan Daerah (X2), Kinerja Ekonomi (Y1), Ketimpangan Pendapatan (Y2) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y3)

Hubungan antar variabel	Original sampel	Standard Deviation	T statistik	P values
X1 → Y3	0,109	0,057	1,900	0,058
X1 → Y2	-0,095	0,084	1,136	0,257
X1 → Y1	0,350	0,096	3,628	0,000
X1 → X2	0,338	0,113	3,003	0,003
Y2 → Y3	0,157	0,055	2,858	0,004
Y1 → Y3	0,642	0,055	11,63	0,000
Y1 → Y2	0,203	0,087	2,339	0,020
X2 → Y3	0,214	0,053	4,033	0,000
X2 → Y2	0,480	0,075	6,370	0,000
X2 → Y1	0,342	0,093	3,680	0,000

Berdasarkan Tabel 2 di atas diketahui bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan kinerja ekonomi. Namun, tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja ekonomi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung antarvariabel konstruk dapat dilihat dari hasil analisis nilai *Indirect Effect* yang ditampilkan pada Tabel 3

Tabel 3. *Nilai Indirect Effect* Desentralisasi Fiskal (X1), Kinerja Keuangan Daerah (X2), Kinerja Ekonomi (Y1), Ketimpangan Pendapatan (Y2) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y3)

Konstruk	Original Sample	Standar Error	T Statistic	P Values	Ket.
X1 → Y3	0,396	0,087	4,549	0,000	Mediasi Penuh
X1 → Y2	0,257	0,050	3,421	0,001	Mediasi Penuh
X2 → Y1	0,116	0,050	2,328	0,020	Mediasi Penuh
Y1 → Y3	0,032	0,020	1,568	0,119	Non Mediasi
X2 → Y3	0,306	0,072	4,242	0,000	Mediasi Penuh
X2 → Y2	0,069	0,040	1,735	0,083	Non Mediasi

Ket = *)Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3 dapat dihitung pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total antarvariabel dalam penelitian ini, yaitu desentralisasi fiskal (X₁), kinerja keuangan (X₂), kinerja Ekonomi (Y₁),

ketimpangan pendapatan (Y₂) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y₃). Penghitungan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total disarikan dan disajikan pada Tabel 5.32.

Tabel 4 Ringkasan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Antarvariabel Penelitian

Kontruk Dependen	Kontruk Independen	
	Kinerja Ekonomi (Y ₁)	Kesejahteraan Masyarakat (Y ₂)
Kinerja Keuangan Daerah		
- Pengaruh Langsung	0,304	0,214
- Pengaruh tidak langsung	-	0,306

- Pengaruh Total	0,304	0,520
Kinerja Ekonomi		
- Pengaruh Langsung	-	0,642
- Pengaruh Tidak Langsung	-	0,032
- Pengaruh Total	-	0,674

b. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan analisis data, maka dapat dirangkum hasil pengujian hipotesis penelitian, sebagai berikut.

1. Kinerjakeuangan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi (Y1).
2. Kinerjakeuangan (X1) dan kinerja ekonomi (Y1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2).
3. Kinerja keuangan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) melalui kinerja ekonomi (Y1).

II. PEMBAHASAN

a. Pengaruh kinerja keuangan terhadap kinerja ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi. Hal ini berarti semakin baik kualitas pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik pula kinerja ekonomi daerah. Temuan ini membuktikan adanya hubungan searah antara kinerja keuangan terhadap kinerja ekonomi. Hasil studi ini mendukung pandangan yang pro kinerja keuangan seperti Tanzi, 1996, Litvack et al. 1998, Tiebout, 1956, Oates, 1972, Tresch, 198, Breton, 1996, Weingast, 1995, Akai dan Sakata, 2002, Thiessen, 2003, dan Desai et al. 2003. dimana kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi.

Adanya hubungan yang Positif dan signifikan dari variabel kinerja keuangan terhadap kinerja ekonomi disebabkan karena adanya peran penting dari belanja daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Belanja daerah merupakan komponen utama pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung merupakan komponen pengeluaran daerah yang sudah pasti terjadi karena bersifat untuk pendanaan kegiatan

rutin terutama untuk aparaturnya daerah pada daerah yang bersangkutan, misalnya belanja modal untuk membiayai pembangunan, membayar gaji pegawai negeri dan honorarium sebagai kompensasi bagi pegawai negeri terhadap aktivitas kegiatan yang dilakukan di daerah. Penerimaan gaji pegawai negeri dan honorarium di daerah yang bersangkutan oleh pegawai negeri akan menjadi faktor pendapatan yang akan digunakan untuk kegiatan konsumsi membeli barang dan jasa yang dibutuhkan pegawai negeri tersebut. Oleh karena itu, kegiatan membeli barang dan jasa akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen/para pengusaha untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi.

b. Pengaruh kinerja keuangan dan kinerja ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh temuan bahwa kinerja keuangan dan kinerja ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yaitu kinerja keuangan dan kinerja ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti semakin baik kualitas kinerja keuangan dan kinerja ekonomi maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Adanya hubungan positif tentu memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat dimana respon masyarakat terhadap kualitas kinerja keuangan dan kinerja ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian selama periode tahun 2008 - 2017 ditemukan bukti bahwa kualitas kinerja keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan daerah mampu membiayai

program-program pembangunan dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini dapat diketahui dari beberapa faktor pendukung antara lain transfer pemerintah pusat ke daerah meskipun ketergantungannya masih tinggi namun daerah masih mampu membiayai program pembangunannya. Berdasarkan uji Kontribusi dana transfer terhadap total pendapatan daerah ditemukan kontribusi transfer mencapai 70 persen per tahun. Hal ini menunjukkan anggaran yang tersedia untuk membiayai program pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disusun pada masing-masing Kabupaten/Kota sehingga pelayanan terhadap masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pendapatan yang layak dapat dilakukan secara optimal.

c. Pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tidak langsung kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan bahwa ada pengaruh tidak langsung kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja ekonomi. Hasil temuan ini membuktikan bahwa kinerja ekonomi sebagai variabel perantara memiliki peran penting mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kinerja keuangan akan semakin efektif dan efisien mempengaruhi kesejahteraan masyarakat apabila kinerja ekonomi dan pemerataan pendapatan meningkat. Semakin efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya. Dengan kemampuan mengelola keuangan yang besar akan meningkatkan kinerja ekonomi yang diwujudkan melalui penurunan angka pengangguran, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat akibat dari bertambahnya investasi swasta dan bertambahnya jumlah penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Selanjutnya, dengan semakin meningkatnya kinerja ekonomi akan membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang selanjutnya akan menurunkan ketimpangan pendapatan antar daerah yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

1. Kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi. .
2. Kinerja keuangan dan kinerja ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja ekonomi.

Saran

1. Pemerintah daerah sebaiknya berfokus pada peningkatan sumber penerimaan daerah (PAD) dengan jalan meningkatkan entrepreneurship usaha milik pemerintah dengan meningkatkan SDM, memperbaiki sistem dan membuka akses seluas-luasnya; mempermudah izin usaha pada semua sektor dan mendorong semangat masyarakat untuk berwiraswasta. Harapan tersebut dapat memperoleh pendapatan melalui pajak dan retribusi.
2. Dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan sangat penting bagi pemerintah untuk menetapkan ukuran keberhasilan PAD tidak hanya dari jumlah yang dapat dipungut atau diterima, namun juga dari perannya dalam mengatur perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat, sangat penting bagi pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan perhatian pada peningkatan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, & Sakata. (2005). Fiscal decentralization, commitment and regional inequality: Evidence from state level cross-Sectional data for The United States. *Osaka: Osaka International University*.
- Astuti, Esther S dan Haryanto. 2005. Analisis Dana Alokasi Umum (DAU) Dalam Era Otonomi Daerah Studi Kasus 30 Provinsi. *Majalah Manajemen Usahawan Indonesia, No.12/TH XXXIV*.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *PDRB Propinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota*. Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram.

- Badan Pusat Statistik, 2018. *Indeks Pembangunan Manusia 2008 - 2017*. BPS, Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *NTB Dalam Angka*. Katalog BPS 1102001.52 Mataram: BPS Nusa Tenggara Barat.
- _____, 2016. *NTB Dalam Angka*. Katalog BPS 1102001.52 Mataram: BPS Nusa Tenggara Barat.
- _____, 2018. *NTB Dalam Angka*. Katalog BPS 1102001.52 Mataram: BPS Nusa Tenggara Barat.
- Davoodi, H., & Zou, Heng-fu. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*, 43:244-57.
- Departemen Keuangan. 2018. *APBD 2008 - 2018*. http://www.djpk.depkeu.go.id/images/konten/data_dkd/setelah_2006/2011/LGF%20Realisasi%203rd%20Quarter%20-%202011.zip diakses pada 10 Desember 2018).
- Departemen Keuangan. 2018. *Realisasi APBD 2008 -2018*. http://www.djpk.depkeu.go.id/images/konten/data_dkd/setelah_2008/2018/LGF%20Realisasi%203rd%20Quarter%20-%202011.zip diakses pada 10 Desember 2018).
- Ebel, Robert D. dan Yilmaz, Seidar, (2002), Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview, World Bank Institute, Tersedia: <http://www.worldbank.org>.
- Faisal, 2011. Fiscal Decentralization and Economic Growth At Provincial Level In Indonesia. *Thesis S2 School Of Policy Studies*, Gorgia State University, Atlanta Georgia.
- Faridi, M Z. 2011. Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences*, 31(1): 1-13.
- Ghozali, Imam. 2011. *Persamaan Structural, Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS*. Semarang: BP.UNDIP.
- Ghozali, Imam dan Sabeni, Arifin. 2001. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Menejemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Jamal A Nasir. 2006. "Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang". *Majalah Manajemen Usahawan Indonesia*. No. 06/TH XXXV.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Iriani, Dewi. 2015. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat DI Provinsi Papua Tahun 1997-2013. *Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta*.
- Jhingan, ML. 1999. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Landiyanto, Erlangga Agustino. 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. *Cures Working Paper*, No. 05/01.
- Levine, R., & Renelt, D. 1992. A Sensitivity Analysis of Cross- Country Growth Regressions. *American Economic Review*, XXXII (4):942-63.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Macroeconomics*, 4th Edition, Worth Publisher, Madison, Avenue, New York.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah*. Penerbit : Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005 - 2008. Dalam Abimanyu, Anggito & Megantara, Andie. Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Martinez-Vasquez, Jorge and Robert M. McNab. 2001. *Fiscal Decentralization and*

- Economic Growth. International Studies Program Working Paper*. Atlanta: Andre Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Martinez-Vasquez, Jorge dan McNab. 2003. Fiscal Decentralization and Economic Growth. *World Development*, Vol. 31, No. 9, pp. 1597-1616. Elsevier Ltd.
- Mydrall, G. 1957. *Economic Theory and Underdeveloped Region*. Methuen London.
- Mubyarto. 2001. Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi. *BPFE, Yogyakarta*.
- McEachern, William, A, 2000, *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer*, Terjemahan, Sigit Triandaru, Salemba Empat, Jakarta.
- Oates, Wallace E. 1993. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal* Vol. 46 No. 2 (June, 1993) 237-243.
- Prud'homme, R. 1994. On the Dangers of Decentralization. *Policy Research Working Paper* 1252. World Bank, Washington DC.
- Prud'homme, Remy, 1995. On the Danger of Decentralization, Washington D.C., The World Bank, *Policy Research Working Paper*, 1252.
- Samuelson, Paul A, dan Nordhaus. 1995. *Pembangunan Ekonomi* (edisi terjemahan). Edisi ke-12. Jakarta: Erlangga.
- Saragih, Juli Panglima, (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Ekonomi Pembangunan*. Vol. 10, No.1, Juni 2009:103 – 124.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Sen dan Foster. 1997. The Political Economic Of Targeting. Di dalam Van de Walle D, Nead K, Editor. *Public Spending And Poor*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Sen. A. 1999. *Employment, Tecnology, And Development Indian Ed*. Oxford University Press New Delhi.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian. Kombinasi Mixed Methods*, Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, Sadono, 2006, *Makro Ekonomi Modern:Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal. 2008. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. *Prisma LP3ES*, No 3 Tahun XXVI.
- Ter-Minassian, Teresa. 1997. *Fiscal Federalism in Theory and Practice*. Washington, International Monetary Fund.
- Thiessen, Ulrich. 2003. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in High Income OECD Countries*. Fiscal Studies Vol. 24 No. 3.
- Thresch, Richard W. 1981. *Public Finance: A Normative Theory*. California: Academic Press.
- Tjokroamidjojo. 1994, *Dasar Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Tiebout, Charles M. 1956. A pure theory of local expenditures. *The Journal of Political Economy*, 64/ 5 (October 1956) , 416 - 424 . The University of Chicago Press.
- Todaro, Michael, P., 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Alih Bahasa Indonesia: Burhanudin Abdullah dan Harris Munandar.
- Todaro, Michael P. 2004. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P dan Smith S.C, 2004, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Alih Bahasa Harris Munandar dan Puji A.L, Erlangga Jakarta
- Thresch, Richard W. 1981. *Public Finance: A Normative Theory*. California: Academic Press.
- Utama, Suyana. 2009. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kinerja Pembangunan Daerah Bali Selatan Tahun 2001-2007*. Laporan Penelitian Program

Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas
Udayana.

- Williamson, J. G. 1997. *Regional and Equity and the Process of National Development; A Description of Patern Economics and Cultural Change*, Vol. 13, No. 4: 3-45.
- Work. 2002. *Overview of decentralization worldwide: A stepping stone to improved governance and human development*. Manila 2nd International Conference on Decentralization.
- Wulandari. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah* (Vol. 5, No. 2). November.
- Xie, D., Zou, H., & Davoodi, H. 1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States. *Journal of Urban Economics*, 45: 228-239.
- Yamoah, Afia Boadiwaa. 2007. *The Effects Of Fiscal Decentralization On Economic Growth In U.S. Counties*. Dessertation, The Ohio State University
- Zhang Tao, & Zou Heng-Fu. 1998. Fiscal Decentralization. Public Spending and Economic Growth in China. *Journal of Public Expenditure*, 67: 221- 240.